



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kelurahan Naikolan
(Gedung B Lantai I dan II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Laman : www.dpmpstsp.nttprov.id Pos-el : dpmpstsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 500.16.7.2-400.3.8/33/DPMPSTSP/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 500.16.7.2-400.3.8/28/DPMPSTSP/2026 TENTANG IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DON
BOSCO KEPADA YAYASAN SALESIAN DON BOSCO DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya maka perlu menetapkan Penyesuaian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti ketentuan terbaru;
 - b. bahwa usulan perubahan kurikulum dari Kepala SMK Don Bosco dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyesuaian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT Nomor 500.16.7.2-400.3.8/28/DPMPSTSP/2026 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Don Bosco kepada Yayasan Salesian Don Bosco di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
2. Surat Usulan dari Kepala SMK Don Bosco Nomor : 054/SMK-DB/SPm/VI/2026 tanggal 05 Juni 2026 tentang Permohonan Perubahan Kurikulum Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Don Bosco ;

Surat Keputusan Menteri
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 233/M/2024 tentang Spektrum Keahlian SMK;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 400.3.8/3583/PK.3 tanggal 10 Juni 2026 (yang baru diterima oleh DPMPSTSP Provinsi NTT tanggal 11 Juni 2026).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Don Bosco kepada Yayasan Salesian terletak di Jl. Rangka Rame Desa Weepangali Kec. Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Bidang keahlian sebagai berikut:

Semula :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknologi Komputer dan Informasi	Teknologi Komputer dan Jaringan	3 Tahun
2.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 Tahun
3.	Seni dan Ekonomi Kreatif	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual	3 Tahun
4	Energi dan Pertambangan	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin	3 Tahun

Menjadi :

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Teknologi Informasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Komputer dan Jaringan	3 Tahun
2	Energi dan Pertambangan	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 Tahun
3	Seni dan Ekonomi Kreatif	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual	3 Tahun
4	Energi dan Pertambangan	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin	3 Tahun

KEDUA : Perubahan Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA : Perubahan Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 02 Juni 2026 sampai dengan tanggal 01 Juni 2031, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang.

- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan Don Bosco berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang

pada tanggal : 11 Juni 2026

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT,



Sylvia R. Peku Djawang, SP., MM
Pembina Utama Madya
NIP 196805121995032003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka;
10. Koordinator Pengawas SMK Kota Kupang di Kupang.